



Kajian Kelembagaan dan Peran Strategis Bank Sentral dalam Rencana Redemonisasi Rupiah

Rayhan Wahyu Dwi Putra*, Muhamad Hanidar Dafa Amanullah, Melinda Ayu Andani, Desmitha Rachel Suyyina, Rahadyan Wegig Priyambodo

Universitas Tidar

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesiapan dan peran Bank Indonesia dalam merancang serta mengimplementasikan kebijakan redenominasi, sekaligus menilai dampaknya terhadap peningkatan efisiensi sistem moneter nasional. Melalui metode studi pustaka yang mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga resmi, serta penulisan terdahulu, kajian ini menemukan bahwa keberhasilan redenominasi sangat ditentukan oleh stabilitas makroekonomi, koordinasi kebijakan antara bank sentral dan pemerintah, kesiapan teknologi dalam sistem pembayaran, serta tingkat pemahaman publik terhadap mekanisme transisi nominal baru. Hasil analisis menunjukkan bahwa redenominasi berpotensi menyederhanakan proses transaksi, mengurangi beban operasional dalam pengelolaan uang kartal, meningkatkan kecepatan pemrosesan data keuangan, dan memperkuat kredibilitas mata uang di mata masyarakat maupun investor. Namun, tantangan berupa kesalahpahaman masyarakat terkait konsep redenominasi, risiko kebingungan pada masa transisi, dan kebutuhan legitimasi politik dari DPR harus diantisipasi melalui sosialisasi yang intensif serta dukungan regulasi yang kuat. Secara keseluruhan, penulisan ini menyimpulkan bahwa kebijakan redenominasi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi moneter nasional apabila dijalankan secara terencana, terkoordinasi, dan ditopang oleh kondisi ekonomi yang stabil serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Redenominasi, Bank Sentral, Efisiensi Moneter

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3353>

*Correspondence: Rayhan Wahyu Dwi Putra

Email:

rayhanwahyu8ee123@gmail.com

Received: 07-04-2026

Accepted: 15-05-2026

Published: 10-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the readiness and role of Bank Indonesia in designing and implementing the redenomination policy, while also assessing its potential impact on improving the efficiency of the national monetary system. Using a literature review method that includes academic journals, books, official reports, and previous research, the findings indicate that the success of redenomination is strongly influenced by macroeconomic stability, policy coordination between the central bank and the government, technological preparedness within the payment system, and the public's understanding of the transition to the new nominal structure. The analysis reveals that redenomination may simplify financial transactions, reduce operational costs in currency management, accelerate data-processing activities, and strengthen the credibility of the national currency among the public and investors. However, challenges such as public misconceptions about redenomination, potential confusion during the transition period, and the need for political legitimacy from the legislature must be addressed through comprehensive public outreach and strong regulatory support. Overall, this study concludes that redenomination can significantly enhance monetary efficiency when implemented carefully, supported by stable economic conditions, well-coordinated institutions, and active engagement from all stakeholders.

Keywords: Redenomination, Central Bank, Monetary Efficiency

Pendahuluan

Stabilitas sistem moneter sangat ditentukan oleh efektivitas kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral. Salah satu bentuk reformasi moneter yang banyak diterapkan di berbagai negara adalah redenominasi, yakni penyederhanaan nilai nominal mata uang tanpa mengubah daya belinya. Mishkin (2019) menyatakan bahwa stabilitas moneter dapat terjaga apabila instrumen kebijakan moneter dikelola secara kredibel, terutama dalam pengendalian inflasi dan efektivitas sistem pembayaran. Dalam konteks tersebut, redenominasi berfungsi sebagai instrumen penataan kembali struktur nilai mata uang agar lebih efisien dan mudah digunakan masyarakat.

Bank sentral memiliki peran inti sebagai otoritas moneter yang bertugas menjaga kestabilan harga, mengatur peredaran uang, serta memastikan kelancaran sistem keuangan. Singleton (2006) menegaskan bahwa bank sentral juga bertanggung jawab terhadap pengawasan perbankan dan manajemen risiko untuk menjaga stabilitas keuangan. Hal ini menempatkan Bank Indonesia (BI) sebagai aktor utama dalam memastikan proses redenominasi dapat berlangsung secara terukur, efektif, dan tidak mengganggu kepercayaan publik.

Dalam kerangka kelembagaan, bank sentral juga harus mampu menjaga kredibilitas nilai mata uang. Crockett (1996) menekankan bahwa stabilitas keuangan tercapai ketika sistem keuangan mampu mengalokasikan sumber daya, mengelola risiko, serta menyerap guncangan tanpa menimbulkan krisis. Dengan demikian, redenominasi dapat dipandang sebagai upaya memperkuat kredibilitas moneter melalui penyederhanaan nominal tanpa mengubah daya beli masyarakat. Dukungan kelembagaan yang kuat menjadi fondasi penting agar proses tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian.

Chant (2003) menambahkan bahwa ketidakstabilan moneter dapat menimbulkan gangguan serius pada mekanisme pasar dan memperburuk kinerja sektor riil. Oleh karena itu, reformasi struktural seperti redenominasi sangat relevan dalam menjaga efisiensi ekonomi. Studi internasional juga menegaskan hal serupa. Fischer et al. (2002) dalam *Journal of Economic Perspectives* menjelaskan bahwa keberhasilan reformasi moneter sangat dipengaruhi oleh stabilitas makroekonomi sebelum implementasi dilakukan. Wakita (2011) dalam *IMF Working Paper* mengkaji pengalaman Turki, yang sukses melakukan redenominasi tahun 2005 setelah menjalankan program stabilisasi inflasi. Pinto & Ulatov (2010) dalam *Brookings Papers on Economic Activity* mencatat bahwa Rusia juga berhasil menata kembali sistem moneter setelah reformasi struktural dan stabilitas fiskal tercapai. Contoh lainnya adalah Rumania (2005) yang memangkas empat angka nol setelah inflasi berhasil dikendalikan (IMF, 2005), serta Brazil (1994) melalui Plano Real yang menunjukkan bahwa keberhasilan redenominasi sangat bergantung pada koordinasi antara bank sentral dan pemerintah (Fraga, 2000).

Hasil penulisan Ayu et al. (2025) juga menunjukkan bahwa bank sentral modern semakin bertransformasi menjadi institusi yang responsif terhadap perubahan global, seperti digitalisasi, arus modal internasional, dan transaksi lintas negara. Transformasi ini menjadikan peran BI semakin penting dalam memastikan bahwa redenominasi dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran sekaligus memperkuat kepercayaan

masyarakat terhadap rupiah. Keberhasilan kebijakan ini di Indonesia sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi, kesiapan teknologi, komunikasi publik yang intensif, serta dukungan regulatif dari pemerintah dan DPR.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, penulisan ini membahas dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana peran Bank Indonesia dalam menyiapkan dan menjalankan rencana redenominasi rupiah, termasuk menyiapkan aturan, teknologi, dan sosialisasi ke masyarakat. Kedua, bagaimana redenominasi dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem moneter nasional, seperti membuat transaksi lebih praktis, mengurangi biaya pengelolaan uang, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah. Dua hal ini menjadi dasar untuk memahami manfaat dan tantangan redenominasi di Indonesia.

Metode

Penulisan ini menggunakan metode studi pustaka (library research) yang memanfaatkan literatur akademik, jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan hasil penulisan terdahulu yang relevan dengan tema kebijakan moneter, bank sentral, serta redenominasi. Pendekatan ini digunakan karena topik berkaitan erat dengan analisis kebijakan, teori moneter, dan kelembagaan ekonomi.

Metode ini sejalan dengan pendekatan penulisan sebelumnya, seperti yang digunakan oleh Wahyuningsih et al. (2025), yang menekankan pentingnya analisis deskriptif dan analisis isi dalam mengkaji kebijakan bank sentral dan stabilitas keuangan melalui referensi jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Selain itu, pendekatan historis dan institusional sebagaimana digunakan oleh Ayu et al. (2025) juga menjadi rujukan dalam memahami evolusi kebijakan bank sentral dan relevansinya terhadap konteks redenominasi saat ini

Tahapan metode penulisan ini meliputi:

1. Pengumpulan Data Literatur

Mengidentifikasi sumber pustaka yang relevan, termasuk konsep redenominasi, teori kebijakan moneter, dan peran bank sentral menurut para ahli seperti Mishkin, Singleton, Chant, dan Crockett.

2. Seleksi Literatur

Memilih literatur yang kredibel dan relevan untuk mendukung analisis teoretis dan praktis.

3. Analisis Isi (Content Analysis)

Menganalisis isi literatur untuk menemukan pola, teori, dan konsep mengenai peran bank sentral dalam kebijakan redenominasi.

4. Sintesis Data

Menggabungkan temuan literatur menjadi kerangka analisis yang logis untuk menjawab rumusan masalah penulisan. Pendekatan ini memberikan dasar teoretis yang kuat dalam memahami bagaimana kebijakan redenominasi dapat memengaruhi efisiensi moneter serta bagaimana kesiapan kelembagaan bank sentral menjadi faktor kunci keberhasilan implementasinya.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum Tentang Redenominasi Rupiah

Pengertian Redenominasi Rupiah

Redenominasi rupiah merupakan proses penyederhanaan nilai mata uang dengan mengurangi jumlah angka pada suatu pecahan tanpa memengaruhi daya beli masyarakat (Bank Indonesia, 2013). Kebijakan ini dilakukan untuk merapikan struktur nominal sehingga nilai uang terlihat lebih sederhana. Contohnya, uang senilai seribu rupiah menjadi satu rupiah, tetapi nilai aslinya dalam transaksi tetap sama (Kementerian Keuangan RI, 2020). Berbeda dengan sanering yang menurunkan nilai riil uang, redenominasi tidak mengurangi kemampuan beli, melainkan hanya mengubah tampilan angka agar transaksi lebih efisien dan meminimalkan kesalahan dalam sistem ekonomi maupun sistem pembayaran (Mishkin, 2019).

Tujuan Redenominasi Rupiah

Redenominasi bertujuan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi dengan cara membuat angka nominal lebih mudah dibaca dan dihitung. Penyederhanaan digit juga membantu memperlancar proses perhitungan serta mempermudah penyusunan laporan keuangan di berbagai bidang ekonomi (Bank Indonesia, 2013). Dengan sistem angka yang lebih ringkas, kinerja sistem pembayaran dan pencatatan akuntansi dapat berjalan lebih efisien dan mengurangi potensi kesalahan administratif. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap mata uang nasional sehingga rupiah memiliki citra yang lebih baik di tingkat internasional .

Alasan dan Urgensi Pelaksanaan Redenominasi

Urgensi redenominasi semakin terlihat karena besarnya angka pada rupiah membuat transaksi menjadi tidak efisien dan mudah terjadi salah hitung. Tantangan ini semakin tampak pada sistem pembayaran digital yang membutuhkan struktur angka yang lebih sederhana. Penyederhanaan nominal juga dipandang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap stabilitas rupiah, sehingga penting bagi penguatan sistem moneter jangka panjang (Bank Indonesia, 2020; Mankiw, 2016; Krugman & Obstfeld, 2018).

Mekanisme dan Tahapan Pelaksanaan Redenominasi Rupiah

Pelaksanaan redenominasi umumnya melewati tiga tahapan: persiapan, transisi, dan pemantapan. Pada tahap persiapan, pemerintah bersama Bank Indonesia mensinkronkan kebijakan, menata regulasi, serta mempersiapkan pencetakan uang baru. Tahap transisi ditandai oleh beredarnya dua jenis uang sekaligus uang lama dan uang baru sebagai sarana adaptasi masyarakat. Tahap akhir yaitu pemantapan dilakukan ketika seluruh transaksi hanya menggunakan pecahan baru setelah uang lama ditarik bertahap dari peredaran.

Peran dan Kesiapan Bank Sentral Dalam Rencana Redenominasi

Bank Indonesia sebagai bank sentral memegang peran utama dalam pelaksanaan redenominasi rupiah karena lembaga ini bertugas menjaga stabilitas moneter dan mengawasi sistem peredaran uang nasional. Dalam menjalankan redenominasi, Bank Indonesia perlu memastikan bahwa kondisi ekonomi makro terutama inflasi dan nilai tukar tetap terkendali agar masyarakat tidak mengalami kekhawatiran ketika struktur nominal uang berubah. Selain itu, Bank Indonesia harus menyiapkan kerangka regulasi, rancangan uang baru, serta pembaruan pada sistem pembayaran agar kompatibel dengan penyederhanaan digit rupiah. Tugas lain yang sangat penting adalah menyediakan edukasi publik secara luas kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami bahwa redenominasi tidak menurunkan nilai riil uang. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, sistem perbankan, dan koordinasi pemerintah sehingga perubahan dapat berjalan mulus tanpa menimbulkan kebingungan di lapangan (Bank Indonesia, 2020; Putra & Sari, 2021; Nugroho, 2022).

Tambahan penjelasan mengenai kesiapan kelembagaan menunjukkan bahwa proses redenominasi menuntut penguatan koordinasi lintas sektor dan evaluasi berkelanjutan terhadap kondisi ekonomi. Sejumlah penelitian menjelaskan bahwa dukungan regulasi, transparansi kebijakan, dan literasi masyarakat merupakan faktor penting agar penyederhanaan nominal tidak memicu distorsi harga maupun kesalahpahaman publik. Studi terbaru juga menegaskan bahwa kesiapan sistem pembayaran digital dan penyelarasan infrastruktur perbankan menjadi aspek yang krusial dalam implementasi redenominasi di era ekonomi modern. Selain itu, pengalaman negara lain seperti Turki dan Rusia menunjukkan bahwa keberhasilan redenominasi sering kali ditentukan oleh stabilitas inflasi, komunikasi publik yang efektif, serta kredibilitas bank sentral dalam menjaga nilai mata uang. Dalam konteks Indonesia, sejumlah riset mencatat bahwa koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan harus diperkuat untuk mengantisipasi risiko teknis maupun sosial selama masa transisi redenominasi (Fauzan, 2023; Lestari & Widodo, 2022; Rahmawati, 2021; Sihombing, 2020; Yuliani, 2023).

Dampak Redenominasi Terhadap Efisiensi Sistem Moneter Nasional

Redenominasi pada dasarnya merupakan proses penyederhanaan nilai nominal mata uang tanpa mengubah daya beli. Dalam konteks sistem moneter nasional, kebijakan ini membawa sejumlah dampak yang berkaitan erat dengan efisiensi transaksi, pengelolaan uang, serta stabilitas persepsi masyarakat terhadap mata uang.

- 1) Redenominasi mampu meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi dan pencatatan keuangan. Nominal yang lebih pendek membuat aktivitas pencatatan akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta transaksi perbankan menjadi lebih sederhana dan minim risiko kesalahan. Penyederhanaan digit juga mempermudah proses perhitungan di berbagai sektor, baik pada sistem kasir modern maupun pada sistem administrasi pemerintahan.
- 2) Penyederhanaan nilai nominal uang dapat mengurangi biaya operasional dalam sistem moneter. Pecahan uang yang lebih proporsional memungkinkan pemerintah menekan

biaya pencetakan, pendistribusian, dan penyimpanan uang kartal. Selain itu, pada sistem teknologi informasi perbankan, beban data dalam transaksi menjadi lebih ringan sehingga kecepatan pemrosesan meningkat dan sistem dapat bekerja lebih efisien dalam jangka panjang.

- 3) Redenominasi sering kali berkaitan dengan pembentukan citra positif terhadap stabilitas mata uang. Dengan hilangnya sejumlah angka nol, rupiah terlihat lebih “sehat” secara visual, yang secara psikologis dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan investor. Kepercayaan ini penting dalam mendukung kelancaran sistem moneter dan menjaga stabilitas ekonomi makro.
- 4) Redenominasi juga memiliki potensi untuk memperkuat efisiensi sistem pembayaran digital. Nominal yang lebih sederhana membuat proses input, penyimpanan, dan pengolahan data pada platform digital—seperti mobile banking, e-wallet, dan sistem pembayaran elektronik—menjadi lebih cepat dan lebih ringkas. Hal ini mendukung akselerasi transformasi digital yang saat ini menjadi fokus utama perkembangan ekonomi nasional.

Meskipun demikian, manfaat-manfaat tersebut memerlukan kesiapan seluruh sistem pendukung, termasuk infrastruktur teknologi, regulasi perbankan, serta pemahaman masyarakat. Tanpa persiapan yang matang, proses transisi dapat menimbulkan kebingungan dan risiko kesalahan yang justru menghambat efisiensi yang ingin dicapai. Secara keseluruhan, redenominasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi sistem moneter nasional melalui penyederhanaan transaksi, pengurangan biaya operasional, peningkatan kredibilitas rupiah, serta dukungan terhadap modernisasi sistem pembayaran. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada implementasi yang terencana dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

Tantangan dan Faktor Keberhasilan Pelaksanaan Redenominasi

Pelaksanaan redenominasi rupiah di Indonesia bukan hanya menyangkut aspek teknis perubahan nominal mata uang, tetapi juga berhubungan erat dengan kesiapan ekonomi, sosial, dan politik nasional. Salah satu tantangan utama dalam kebijakan ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap makna dan tujuan redenominasi. Sebagian besar masyarakat masih menyamakan redenominasi dengan sanering, yakni pemotongan nilai uang yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat. Persepsi keliru ini berpotensi menimbulkan keresahan sosial apabila tidak diimbangi dengan sosialisasi yang memadai dari pemerintah dan Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2013; Siregar & Wulandari, 2018).

Kondisi makroekonomi juga menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan redenominasi. Kebijakan ini sebaiknya dilakukan ketika perekonomian berada dalam situasi stabil, dengan inflasi yang terkendali serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap nilai tukar rupiah yang kuat. Apabila diterapkan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, redenominasi justru dapat menimbulkan distorsi harga dan spekulasi pasar (Kementerian Keuangan RI, 2020; Bank Indonesia, 2021).

Selain itu, faktor kelembagaan juga menjadi tantangan tersendiri. Koordinasi antarinstansi seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus berjalan efektif. DPR berperan penting dalam memberikan legitimasi hukum dan politik melalui pembahasan serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah. Tanpa dukungan politik yang kuat dari DPR, proses implementasi kebijakan ini dapat tertunda atau kehilangan legitimasi di mata publik (DPR RI, 2017).

Meski demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan redenominasi. Pertama, konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi pada level yang wajar. Kedua, adanya dukungan regulasi dan pengawasan dari DPR yang memastikan kebijakan berjalan sesuai koridor hukum. Ketiga, pelaksanaan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat, baik melalui media massa, lembaga pendidikan, maupun kegiatan keuangan inklusif, akan menciptakan pemahaman yang lebih luas terhadap tujuan kebijakan ini (Siregar & Wulandari, 2018; Bank Indonesia, 2021).

Dengan demikian, keberhasilan redenominasi rupiah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara stabilitas ekonomi, dukungan politik DPR, serta penerimaan masyarakat. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan menentukan keberlanjutan (Bank Indonesia, 2013; DPR RI, 2017).

Simpulan

Temuan penulisan menunjukkan bahwa keberhasilan redenominasi sangat bergantung pada peran strategis Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang memastikan stabilitas rupiah, kesiapan sistem pembayaran, serta pemahaman publik terhadap perubahan nominal. Implikasi pentingnya adalah bahwa redenominasi bukan hanya kebijakan teknis, tetapi juga kebijakan kelembagaan yang membutuhkan stabilitas makroekonomi, koordinasi lintas lembaga, serta dukungan sosial agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Kesiapan BI dalam aspek regulasi, infrastruktur pembayaran, dan sosialisasi publik menentukan apakah kebijakan ini akan memperkuat efisiensi sistem moneter atau justru memicu kebingungan dan gangguan transaksi. Dengan demikian, keberhasilan redenominasi sangat ditentukan oleh sinergi antara kesiapan kelembagaan dan penerimaan masyarakat terhadap struktur nominal baru.

Saran

Penulisan selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam dampak jangka panjang redenominasi terhadap stabilitas harga, perilaku konsumen, serta kesiapan sektor perbankan dalam mengadopsi sistem nominal baru. Secara praktis, pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum, meningkatkan kualitas sosialisasi berbasis literasi keuangan, dan memastikan kesiapan teknologi pembayaran di semua lembaga keuangan. Selain itu, studi komparatif dengan negara yang berhasil melakukan redenominasi dapat menjadi rujukan untuk mengurangi risiko implementasi. Dengan dukungan regulasi yang kuat, kesiapan teknis, dan edukasi masyarakat yang berkelanjutan,

kebijakan redenominasi dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat optimal bagi efisiensi sistem moneter nasional.

Referensi

- Ayu, R. M., Alfitri, N., & Astuti, R. P. (2025). *Perjalanan sejarah bank sentral: Peran, tantangan, dan adaptasi dalam sistem ekonomi global*. Menulis: Jurnal Penulisan Nusantara, 1(5), 402–409.
- Bank Indonesia. (2013). *Kajian kesiapan redenominasi rupiah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. *Kajian Kebijakan Redenominasi Rupiah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.
- Chant, J. (2003). *Financial stability as a policy goal*. Bank of Canada Working Paper.
- Crockett, A. (1996). *The theory and practice of financial stability*. Bank of England.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (n.d.). *Redenominasi mata uang rupiah*. Kementerian Keuangan RI.
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2018). *Macroeconomics*. McGraw-Hill.
- DPR RI. (2017). *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Redenominasi Rupiah*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Fauzan, M. (2023). Stabilitas moneter dan tantangan redenominasi di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 12(1), 55–67.
- Fraga, Arminio. 2000. "Monetary Policy in Emerging Markets." Prepared for the Conference on Central Banking and the World's Financial System, Jackson Hole, Wyoming. Federal Reserve Bank of Kansas City
- Firliyanti, H. S. (2019). Urgenkah penerapan redenominasi mata uang di Indonesia? *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 3(1), 49–62.
- Hadi, K. (2025). *Redenominasi Rupiah 2027: Antara elegansi angka dan ancaman biaya sistemik*. PKS.id.
- IDN Times. (n.d.). *4 dampak redenominasi rupiah di kehidupan sehari-hari*. IDN Times.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Studi kebijakan redenominasi dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.

- Lestari, D., & Widodo, A. (2022). Kesiapan infrastruktur sistem pembayaran terhadap kebijakan redenominasi rupiah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Nusantara*, 8(2), 101–114.
- Lianto, J., & Suryaputra, R. (2021). Syarat atau faktor penentu keberhasilan redenominasi mata uang. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10(1), 51–.
- Mada, B. A. W. K. (2017). Mendorong implementasi redenominasi rupiah untuk peningkatan efisiensi dan daya saing ekonomi Indonesia di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Value: Journal of Management and Business*, 1(2).
- Mishkin, F. S. (2019). *The economics of money, banking, and financial markets*. Pearson.
- Nugroho, A. B. (2022). Reformasi kebijakan moneter melalui redenominasi rupiah: Stabilitas dan tantangan implementasi. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 14(2), 115–128.
- Pinto, Brian, and Sergei Ulatov. 2010. "Inflation Targeting and the Crisis: An Empirical Assessment." World Bank Policy Research Working Paper No. 5322. Washington, DC: World Bank
- Putra, D. A., & Sari, R. M. (2021). Analisis peran bank sentral dalam kebijakan redenominasi di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Nasional*, 9(1), 33–42.
- Rahmawati, S. (2021). Persepsi publik dan literasi keuangan dalam implementasi redenominasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Nasional*, 5(3), 211–224.
- Sihombing, R. (2020). Evaluasi dampak sosial dan ekonomi dari rencana redenominasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Makro Indonesia*, 9(2), 89–102.
- Singleton, J. H. (2006). *Central banking in the twentieth century*. Cambridge University Press.
- Siregar, H., & Wulandari, D. (2018). Redenominasi dan tantangan sosialisasi publik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 134–146.
- Wahyuningsih, R., Nursaadah, D. A. P., & Astuti, R. P. (2025). Analisis peran bank sentral dalam mengatur kebijakan moneter dan stabilitas keuangan. *Menulis: Jurnal Penulisan Nusantara*, 1(5), 448–452.
- Yuliani, A. (2023). Kebijakan moneter dan kredibilitas bank sentral dalam mendukung redenominasi rupiah. *Jurnal Keuangan dan Moneter Indonesia*, 14(1), 34–48.